

---

## ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI

Matias L. Boyar<sup>1\*</sup>, Adolf Z. D. Siahay<sup>2</sup>, Juliana Waromi<sup>3</sup>

<sup>1\*23</sup> *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*  
*\*Corresponding Author*

### Abstract

*To supervise the management and responsibility of state/regional finances, BPK audits the financial statements of the central and regional governments every year. After that, BPK prepares an Audit Report (LHP), submitted to the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives by their respective authorities. The audit results were also submitted to the government and the leaders of the inspected agencies to follow up on the results. This collaborative process ensures the audit results are improved under the BPK's suggestions/recommendations. This study is quantitative descriptive research with a survey approach. The data collection technique uses a questionnaire. Data processing is carried out using the SPSS 21 application. The number of samples in this study is 30 respondents. The study results show that the performance assessment and quality of BPK recommendations significantly affect completing the follow-up of BPK recommendations.*

**Keywords:** *Performance Assessment, Quality of BPK Recommendations, and Process for Completing Follow-up of BPK Recommendations.*

### Abstrak

Untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara/daerah, setiap tahun, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Setelah itu, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pemerintah dan pimpinan instansi yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar dapat diperbaiki sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis pendekatan survey. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan kualitas rekomendasi BPK berpengaruh signifikan terhadap proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

**Kata Kunci:** Penilaian Kinerja, Kualitas Rekomendasi BPK dan Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

## Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung hampir 20 tahun memberikan pengajaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien guna mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berfungsi sebagai auditor eksternal yang melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seiring dengan itu, APIP yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memiliki peran sebagai auditor internal yang bertindak sebagai "penjamin kualitas". APIP, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, serta Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (Rondonuwu et al., 2022) bertujuan mendorong pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pemerintahannya.

Untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara/daerah, setiap tahun, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Setelah itu, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pemerintah dan pimpinan instansi yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar dapat diperbaiki sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. (Putra & Sentosa, 2021).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, auditee diharuskan untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat dalam waktu 60 hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kajian mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ini masih menjadi aspek menarik untuk diselidiki, mengingat setiap pemerintah memiliki tingkat kesadaran yang bervariasi. (Pramana, 2022).

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan bukanlah unsur utama, melainkan merupakan elemen pelengkap yang memiliki nilai penting. Jika tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan tahun sebelumnya tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada tahun berikutnya, dan seterusnya. Nunu et al., (2017) Menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya temuan berulang melibatkan kurangnya koordinasi dan komunikasi, rendahnya integritas dan nilai etika, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketiadaan komitmen dari pimpinan, terjadinya mutasi di bidang pengelolaan keuangan, dan adanya perubahan dalam regulasi.

Fenomena yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah adanya banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK untuk periode pemeriksaan tahun 2022, Kabupaten SarMI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa temuan, seperti pengelolaan aset yang belum terorganisir dengan baik, ketidakjelasan dalam pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara, dan ketidakpastian dalam realisasi perjalanan dinas. BPK memberikan rekomendasi perbaikan terhadap masalah tersebut, yang diharapkan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten SarMI. Dari total 876 rekomendasi yang diberikan, Pemerintah Kabupaten SarMI telah menindaklanjuti sebanyak 502, mencapai tingkat keterlaksanaan sekitar 57,31 persen (<https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/28/07/2022/masih-ditemukan-pengelolaan-aset-yang-belum-tertib/>).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berhasil mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan publik termasuk dalam kerangka hukum dan struktur organisasi yang dirancang untuk melakukan pengawasan terhadap siklus anggaran, penyusunan anggaran, pengadaan, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian melalui fungsi audit internal. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan kontrol guna meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bandi, 2015).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meninjau terkait penyelesaian hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten SarMI dengan judul penelitian “**Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten SarMI**”.

## **Kajian Pustaka**

### **Teori Agensi**

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, teori keagenan menunjukkan relasi antara prinsipal yang diwakili oleh masyarakat melalui DPRD (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) sebagai agen. Masyarakat memberikan otoritas kepada pemerintah sebagai agen dan menyediakan dukungan sumberdaya berupa APBD sebagai alat untuk menjalankan tugas pemerintahan yang efektif demi mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindakan pertanggungjawaban, pihak agen (eksekutif) akan memberikan laporan atas pengelolaan APBD yang telah disetujui oleh prinsipal. Hal ini mencakup laporan pertanggungjawaban seperti laporan keuangan pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun. (Nahor et al., 2021).

Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemerintah sebagai pihak pelaksana (agen) melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). BPK berharap bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaannya terhadap lembaga negara atau pemerintah dapat segera

diimplementasikan untuk meningkatkan manajemen keuangan negara/daerah. Keberhasilan pemeriksaan BPK dapat terwujud apabila laporan hasil pemeriksaannya mendapat respons dan tindak lanjut dari entitas yang sedang diperiksa. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemerintah (Nahor et al., 2021).

### **Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Pemeriksaan merujuk pada proses pengidentifikasian, analisis, dan evaluasi permasalahan. Dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan, dengan tujuan memberikan penilaian yang wajar terhadap pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan yang mencakup tiga aspek, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Budiman et al., 2015).

### **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merujuk pada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemeriksa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada pihak yang sedang diperiksa. Ini mencakup aktivitas untuk mengenali dan mendokumentasikan perkembangan yang dicapai oleh entitas dalam menjalankan rekomendasi audit (Rai, 2008) dalam (Pramana, 2022).

Efektivitas suatu tugas pemeriksaan dapat diukur dari sejauh mana rekomendasi yang berdasarkan temuan pemeriksaan telah diimplementasikan oleh pihak entitas yang diperiksa. Penggunaan sumber daya untuk melaksanakan tugas pemeriksaan menjadi tidak bermanfaat jika akhirnya rekomendasi tidak dijalankan, sehingga permasalahan yang terungkap tetap berlanjut. Keberhasilan suatu pemeriksaan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat dan tepatnya pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan (Nahor et al., 2021).

### **Temuan dan Rekomendasi**

Hasil pemeriksaan merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pernyataan fakta. Temuan pemeriksaan timbul dari perbandingan antara apa yang seharusnya ada dan kenyataan yang ditemukan. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pernyataan nomor 2, pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengidentifikasi elemen-elemen temuan pemeriksaan. Elemen-temuan tersebut, berdasarkan SPKN pernyataan nomor 3, mencakup kondisi, kriteria, akibat, dan sebab (Sayekti & Bastian, 2016).

Temuan audit berfungsi sebagai media antara auditor dan auditee memperoleh informasi dan penjelasan selama kegiatan audit berlangsung (Rai, 2011) dalam (Sayekti & Bastian, 2016). Audit BPK menemukan perihal pemeriksaan keuangan yang terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu daerah terhadap sistem pengendalian intern dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Temuan pada aspek sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap peraturan hukum memberikan saran mengenai cara untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi.

### **Penilaian Kinerja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Dapat disimpulkan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi Pangumbalerang & Pinatik, (2014).

### **Pengembangan Hipotesis**

Bagian ini menguraikan pengembangan tiga hipotesis, sebagai berikut:

#### *Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK*

Pramana (2022) menyatakan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Nganjuk belum 100% terselesaikan, adapun faktor yang menjadi penghambat dalam terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal, kurangnya komitmen dan motivasi dari pimpinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan dalam hipotesis:

H1 : Penilaian kinerja berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut BPK

#### *Pengaruh Kualitas Rekomendasi terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK*

Putra & Sentosa (2021) menyatakan bahwa terdapat lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Faktor internal ini adalah SDM, mutasi, koordinasi yang belum maksimal, lemahnya SPI dan belum adanya sanksi yang tegas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya TLHP adalah persepsi pemeriksa yang berbeda-beda, pihak ketiga yang kurang responsif dan banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung.

Maka hipotesis yang dapat dirumuskan ialah:

H2 : Kualitas Rekomendasi berpengaruh terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis pendekatan survey. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana sampel yang diambil ialah informan kunci dari kantor OPD di Pemerintah Kabupaten Sarmi yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub-bagian

Pelaporan dan Staf Teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah pembagian kuesioner secara langsung kepada para informan. Alat analisis data yang digunakan ialah SPSS 21 sebagai alat pengujian statistic data.

## Hasil Dan Pembahasan

Langkah pertama ialah pengujian statistic deskriptif terhadap data sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_PK	35	18	30	23.91	3.390
Total_KR	35	27	45	37.00	4.557
Total_PR	35	21	35	28.69	3.504
Valid N (listwise)	35				

Sumber: *Data diolah, 2023*

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa nilai variabel penilaian kinerja (X1) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata yaitu 23.91 dan nilai standar deviation yaitu sebesar 3.390.

Berdasarkan tabel dibawah ini, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 4.2 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,643 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya persebaran dari variabel penilaian kinerja (X1), variabel kualitas rekomendasi (X2) dan variabel penyelesaian tindak lanjut rekomendasi (Y) berdistribusi dengan normal.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.12146867
	Absolute	.125
Most Extreme Differences	Positive	.125
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.740
Asymp. Sig. (2-tailed)		.643

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data diolah, 2023*

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah nilai 10 model regresi dinyatakan telah memenuhi asumsi multikolinieritas.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.808	3.251		1.479	.149		
1 Total_PK	.440	.136	.426	3.240	.003	.663	1.509
Total_KR	.361	.101	.469	3.569	.001	.663	1.509

a. Dependent Variable: Total\_PR

Sumber: *Data diolah, 2023*

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh semua variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10. Dan untuk hasil perhitungan nilai variance inflation faktor (VIF) menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu variabel PK senilai 1.509, dan variabel KR senilai 1.509. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.

Pada penelitian ini dilakukan uji glejser untuk menunjukkan heteroskedastisitas. Model dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas jika variabel bebas berpengaruh signifikan secara statistik terhadap residual absolut. Pada saat menguji persamaan regresi, ditemukan bahwa model dipengaruhi oleh heteroskedastisitas. Dikatakan terjadi heteroskedastisitas jika nilai variabel independen signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-.171	2.120		
1	Total_PK	.024	.089	.059	.273
	Total_KR	.032	.066	.103	.478

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: *Data diolah, 2023*

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap residual absodut. Dari hasil perhitungan nilai uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai  $< 0,05$  yaitu variabel PK sebesar 0,787 dan variabel KR sebesar 0.636. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

## Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	4.808	3.251		
1	Total_PK	.440	.136	.426	3.240
	Total_KR	.361	.101	.469	3.569

a. Dependent Variable: Total\_PR

Sumber: *Data diolah, 2023 (Lampiran 3)*

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penilaian kinerja terbukti secara empiris berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistiknya yaitu variabel PK sebesar 0.003, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak dapat di tolak atau diterima sehingga H1 dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Utama, 2019) yang menyatakan bahwa Kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Kinerja sebuah instansi pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Faktor-faktor berikut menjelaskan bagaimana kinerja instansi pemerintah dapat memengaruhi proses ini: responsive terhadap rekomendasi, kepastian manajemen internal, keterbukaan dan akuntabilitas, ketersediaan sumber daya, komitmen pimpinan, budaya organisasi dan peningkatan kualitas layanan.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas rekomendasi berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terbukti secara empiris. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dari variabel yang memiliki nilai t atau signifikansi  $<0,05$  yaitu variabel KR sebesar 0.001, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas rekomendasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak dapat di tolak atau diterima.

Kualitas Rekomendasi (KR) memiliki peranan yang sangat penting dan signifikan dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengawasan, tetapi juga mencerminkan tingkat keprofesionalan dan kehandalan lembaga tersebut. Mengapa KR memiliki dampak yang besar terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK karena rekomendasi dapat diukur dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia akan lebih mudah direalisasikan. Kualitas rekomendasi yang memberikan solusi yang keterukuran dan kelayakan dalam konteks lembaga yang diaudit akan meningkatkan kemungkinan penyelesaian tindak lanjut.

## **Penutup**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja dan kualitas rekomendasi BPK berpengaruh signifikan terhadap proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Sehingga, dapat disetujui bahwa penilaian kinerja dan kualitas rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar dari variabel yang di teliti misalnya sistem pengendalian internal dan komitmen pimpinan.

---

## Daftar Pustaka

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. . CV. Andi.
- Bandi, I. W. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP, dan Presentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148–157.
- Budiman, R. Y., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2015). Pengaruh E- Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2).
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. . *Law Reform*, 13(2).
- Lusiana, A. D., & Yoney, W. P. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2).
- Nahor, J. L. B., Adriani, A., & Nor, W. (2021). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK PADA PEMERIKSAAN KINERJA ATAS KEGIATAN APIP INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1).
- Nunu, I., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2017). ). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill*, 8(1), 32–42.
- Nurhayati, A., Sudjana, & Ishak, J. F. (2022). Analisis Faktor Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Temuan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung). 3(1), 84–92.
- Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH. *Jurnal EMBA*, 2(2), 800–808.
- Pramana, A. C. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK. *Bilacia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 210–215.
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 120–128.
- Rondonuwu, A. O., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,”* 13(2), 1–13.
- Sayekti, F. N., & Bastian, I. (2016). TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- Utama, D. P. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 101–106.

Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112–123.